

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa baru-baru ini. Baik pemerintah pusat dan daerah pernah mengalami perkembangan ini (Widari dan Sutrisno, 2017: 117). Pemerintah diminta agar dapat menyelenggarakan transformasi untuk sistem pemerintahan yang ada. Salah satunya adalah melaksanakan otonomi daerah yang luas, benar dan bertanggung jawab. Keberadaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk tuntutan masyarakat akan ketidakadilan ekonomi yang selama ini mereka terima. Perihal ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut penting karena diharapkan dapat membawa perubahan mendasar bagi sistem keuangan pemerintah pusat serta daerah.

Namun dari salah satu fenomena yang terjadi menurut Vitorio Mantalean dari lama *kompas.com* 2019 munculnya kritik bagi pemerintah kota Bekasi yang dinilai tidak transparan soal kas daerah, warga dan anggota dewan tidak tau pasti perihal jumlah serapan anggaran hingga besarnya pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang didukung dengan PP Nomor 8 tahun 2006 berkenaan dengan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menegaskan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disampaikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yaitu prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran berkaitan dengan anggaran yang sudah direalisasikan (Kurniawan 2013:2). Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2002: 37) yang tidak hanya mewajibkan pemerintah daerah untuk melapor kepada pemerintah pusat, tetapi juga perlu melaporkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat luas dalam bentuk sistem akuntabilitas horizontal.

Kinerja merupakan faktor keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran hasil pelaksanaan suatu kegiatan dalam menghasilkan sasaran, rencana dan tujuan organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi suatu kelompok yang telah dilaksanakan pada waktu tertentu. Hasil kinerja dalam organisasi sangat penting untuk evaluasi dan juga perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang dipakai dalam pengendalian disiapkan, untuk menjamin tugas telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Kinerja Organisasi publik adalah sebuah ukuran prestasi atas capaian dalam mengelola dan mengoperasikan organisasi yang menangani semua hal yang telah diselesaikan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ukuran kinerja sektor publik penting diterapkan karena dapat dijadikan acuan dalam merumuskan Kinerja Organisasi agar dapat menjadi lebih baik di periode berikutnya. Menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja sektor publik adalah untuk mencapai tiga tujuan, yaitu membantu meningkatkan kinerja pemerintah, mendistribusikan sumber daya serta mengambil keputusan, mewujudkan akuntabilitas organisasi publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Menurut Aisyah dan Safitri (2014) menjelaskan manfaat dalam peningkatan kinerja yaitu dengan tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatnya pelayanan kepada publik melalui pelaksanaan *Good Governance*. Selain itu menurut pendapat (Ambarwati, 2013) Organisasi yang menerapkan praktik tata kelola yang baik telah berusaha meminimalkan risiko keputusan yang salah atau menguntungkan diri sendiri untuk meningkatkan kinerja

Good Governance sendiri didefinisikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik pada organisasi yang dilandasi etika profesi dalam berusaha atau berkarya (Azlina dan Amelia, 2014: 35). Penelitian tentang *Good Governance* memberikan bukti nyata bahwa *Good Governance* merupakan faktor penting yang berkaitan dengan kinerja suatu organisasi (Setyawan dan

Dwija Putri, 2013). Dengan demikian, ada hubungan pelaksanaan *Good Governance* terhadap efektivitas Kinerja Organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugerah (2019:187) bahwa *Good Governance* mempengaruhi Kinerja Organisasi secara persial. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Susanti (2014:13) mengungkapkan bahwa *Good Governance* signifikan mempengaruhi Kinerja Organisasi Kabupaten Siak. Namun berbeda dari penelitian Pamilih (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu dalam meningkatkan suatu Kinerja Organisasi publik, maka Sistem Informasi Akuntansi yang dimiliki juga harus efektif. Diketahui bahwa, Sistem Informasi Akuntansi diciptakan guna mempermudah pekerjaan suatu organisasi untuk mengolah data akuntansi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi (dharmaningsih et al. 2017). Sistem Informasi Akuntansi sendiri menurut Widjajanto (2001) diartikan sebagai susunan dari berbagai dokumen, peralatan salah satunya komputer dan perlengkapan-nya, alat komunikasi cacatan, tenaga pelaksana serta seluruh laporan yang dibuat untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

Penerapan teknologi Sistem Informasi Akuntansi memberikan nilai tambah kepada pengguna berupa penyediaan berbagai informasi keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh (Wiguna, 2016). Oleh karena itu, semakin tinggi Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan maka semakin tinggi kualitas Kinerja Organisasi yang dihasilkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Wiguna et al (2016) menunjukan bahwa secara signifikan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Begitu juga dengan penelitian Dharmaningsih et al. (2017) yang menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi. Namun berbeda dari sebelumnya Dewi et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara persial dan simultan tidak ada

pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi.

Menurut Siagian (2002) terdapat faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Organisasi salah satunya yaitu budaya organisasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya Budaya Organisasi diuji sebagai variabel moderasi, hasil penelitian Wiguna (2016) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi yang menjadi variabel moderasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya Budaya Organisasi diuji sebagai variabel moderasi, hasil penelitian Wiguna (2016) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi yang menjadi variabel moderasi secara positif berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.

Budaya organisasi dimasukkan sebagai variabel moderasi dikarenakan budaya organisasi sebagai bentuk dari nilai-nilai yang biasa diyakini, diterapkan serta dikembangkan guna sebagai acuan dalam berperilaku untuk mencapai tujuan dalam organisasi yang sudah ditetapkan. Salah satunya dapat diterapkan dalam aturan berperilaku untuk meningkatkan Kinerja Organisasi lewat penerapan prinsip *Good Governance* dan sistem informasi yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan menurut Hasanuddin Wahid dari laman *kompas.com* 2020 sejatinya disamping budaya kerja, budaya organisasi adalah salah satu aset paling berharga yang beresiko selama pandemi Covid-19. Karnanya budaya organisasi memberikan dampak cukup besar terhadap peningkatan kinerja aparatur dalam rangka optimalisasi pencapaian target.

Tentunya dalam sebuah organisasi, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mencapai tujuannya, sedangkan perilaku individu yang beragam dan mempunyai kepentingan masing-masing yang mempengaruhi jalannya organisasi. Oleh karena itu, Budaya Organisasi penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan suatu organisasi. Kebiasaan ini mengatur kode etik yang harus diikuti serta dipatuhi anggota organisasi, agar terciptanya tujuan perusahaan dari penerapan budaya yang erat.

Budaya Organisasi adalah gabungan nilai dan norma kepercayaan sebagai aturan dalam bertindak dalam suatu organisasi (Triguno, 2000).

Menurut Cushway B dan Lodge D (dalam Nawawi, 2003) mengemukakan bahwa Budaya Organisasi adalah suatu keyakinan dan nilai dalam diri anggota organisasi untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dari berbagai definisi Budaya Organisasi yang sudah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi merupakan nilai-nilai yang dipercaya dan dipelajari, diterapkan serta dikembangkan oleh anggota organisasi, guna sebagai sistem perekat, dan untuk dijadikan pedoman berperilaku suatu organisasi agar tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Perilaku para anggota organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya dalam organisasi, jadi tidak heran bila terdapat anggota organisasi yang baik dan berkualitas, bisa jadi karna Budaya Organisasi yang diterapkan didalamnya yang menjadi salah satu faktor keberhasilan kualitas tersebut. Hal ini akan mendorong Kinerja Organisasi menjadi lebih baik dan berkualitas pula. Sesuai dengan hasil penelitian Yusnandar (2020) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda dalam penelitian Dewi et al. (2017) menyatakan bahwa secara persial dan simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian diatas menjadikan suatu pembahasan yang menarik untuk diteliti. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu, peneliti menggabungkan dari beberapa variabel yang ada dalam research gap dan menambahkan variabel moderating yang kemudian peneliti jadikan pembahasan untuk diolah dan menghasilkan penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya.

Atas dasar inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah kemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi?
3. Apakah Budaya Organisasi dapat memoderasi pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi?
4. Apakah Budaya Organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan atau wawasan dibidang kinerja sektor publik terutama dalam masalah *Good Governance* dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi

dengan Budaya Organisasi yang digunakan sebagai variabel moderating, sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa Budaya Organisasi yang baik akan membantu meningkatkan Kinerja Organisasi. Selain itu masyarakat juga menjadi kritis terhadap kasus penyelewengan atau pelanggaran kinerja yang dilakukan oknum dalam penyelenggaraan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam memperdalam pengetahuan tentang Kinerja Organisasi khususnya yang berkaitan dengan Good Governance dan Sistem Informasi Akuntansi dengan Budaya Organisasi yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

b. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan pengembangan literature akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian kinerja di sektor publik. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian yang akan meneliti fenomena yang sama. Juga penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik lainnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada empat variabel yang digunakan yaitu Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi dengan penambahan variabel pemoderasi yaitu Budaya Organisasi dengan kriteria responden adalah pegawai unit akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam penelitian, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi teori-teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi profil instansi, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan implikasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN